



Judul : Kurangi Ketergantungan Impor - Industri Kimia Perlu Digenjot
Tanggal : Selasa, 17 April 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 14

Kurangi Ketergantungan Impor

Industri Kimia Perlu Digenjot

DPR mendukung langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memasukkan petrokimia sebagai salah satu industri yang akan dikembangkan dalam Making Indonesia 4.0. Langkah ini diharapkan bisa menekan ketergantungan impor produk petrokimia.

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto mengatakan, parlemen mendukung pengembangan industri petrokimia nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menciptakan nilai tambah dari rantai industri.

"Kita tidak ingin bahwa industri kita akan lebih banyak mendatangkan barang dari luar negeri dan tidak mengembangkan industri petrokimianya di dalam negeri," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Padahal, kata Dito, permintaan terhadap produk-produk hasil industri petrokimia di dalam negeri cukup besar. Apalagi bahan baku untuk pengembangan industri petrokimia itu sangat

banyak tersedia di Tanah Air.

Politisi Golkar itu mengakui, Indonesia sudah sangat terlambat mengembangkan industri petrokimia di dalam negeri. Alhasil, kita terlalu lama mengimpor banyak produk petrokimia termasuk dari Vietnam, Thailand, dan Singapura yang tidak memiliki bahan baku sebanyak yang dimiliki RI. Indonesia memiliki sumber daya minyak dan gas bumi yang dapat dikembangkan menjadi industri petrokimia.

"Produk-produk kimia itu sangat dibutuhkan di dalam negeri sebagai substitusi impor dan bahkan dapat diekspor. Sementara, selama ini sudah terlalu banyak yang kita ekspor sebagai bahan mentah saja," paparnya.

Karena industri petrokimia nasional belum siap, menurut dia, impor tetap harus dilakukan secara selektif, jangan sampai pasar dalam negeri dibanjiri oleh produk-produk impor yang sebenarnya industri kita sudah mampu menyediakannya. Kemudahan impor itu tidak boleh diartikan dapat untuk mempermudah impor produk-produk yang patut diduga mengandung unsur dumping.

"Impor produk petrokimia tetap dapat dilakukan dengan semangat memajukan industri di dalam negeri terlebih dahulu," katanya.

Menurut dia, industri petrokimia di dalam negeri didorong dan dipermudah pembangunannya, termasuk dengan memberikan peluang untuk tumbuh besar lebih dahulu dan tidak langsung dipersaingkan dengan produk-produk impor.

Sekjen Kemenperin Haris Munandar mengatakan, kemudahan impor janganlah menjadi penyebab industri di dalam

negeri tidak mengembangkan kegiatannya dan memilih hanya menjadi pengimpor saja.

Untuk diketahui, sebelumnya pelaku industri petrokimia mengeluhkan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Impor Bahan Baku Plastik. Beleid itu menyebutkan impor bahan baku plastik tidak lagi membutuhkan rekomendasi Kemenperin dan dikhawatirkan membuat banjir produk petrokimia di dalam negeri.

Tax Holiday

Sementara itu, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Badan dapat mendorong peningkatan investasi industri petrokimia di Indonesia. Sebab, aturan ini memberikan fasilitas *tax holiday* itu dianggap mudah diimplemen-

tasikan oleh industri petrokimia.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyo mengatakan, aturan ini memberikan kepastian karena keputusan Menteri Keuangan atas usulan pengurangan PPh Badan dari BKPM diterbitkan paling lama lima hari. Pada aturan sebelumnya, pengurusan fasilitas *tax holiday* ini diperkirakan memakan waktu sekitar 45-125 hari kerja.

Selain itu, nilai rencana penanaman modal yang dapat diberikan *tax holiday* pun dibagi mulai dari Rp 500 miliar hingga Rp 30 triliun dengan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, industri petrokimia berskala kecil pun dapat turut menikmati fasilitas *tax holiday* ketika berinvestasi.

Fajar berharap dengan adanya PMK ini impor untuk memenuhi kebutuhan etilen di Indonesia dapat diturunkan. Saat ini Indonesia melakukan impor sebesar 60 persen dari kebutuhan enam juta ton etilen per tahunnya. ■ DIT